

Koordinasi Pemerintah dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang)

Widia Ierdiana^{1*}, Rudi Subiyakto², Rizky Octa Putri Charin³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat : Jalan Raya Dompok-Tanjungpinang 29111, Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: 2105010015@student.umrah.ac.id*

Abstract. *Flooding is a natural disaster that still frequently occurs in Singkep District, Lingga Regency, Riau Islands Province. This disaster has quite serious impacts on the community, both in the economic, social, and health sectors. Therefore, the problem of flooding should be a serious concern for the local government, particularly in improving the effectiveness of coordination between agencies directly involved in flood mitigation efforts. This study aims to determine the coordination process between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Public Works and Spatial Planning Agency (PUTR) of Lingga Regency in flood management, as well as to identify obstacles encountered in its implementation. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The researcher uses the coordination theory of Harold Koontz which emphasizes four important elements: work planning, meetings or interactions, communication, and division of tasks. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from both related agencies. The results of the study indicate that inter-agency coordination has not been running synergistically. The work plans of each agency have not been fully integrated, resulting in the implementation of the flood mitigation program running independently based on their respective duties and functions. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) places greater emphasis on non-structural mitigation approaches such as education and simulations, while the Public Works and Housing Agency (PUTR) focuses on technical aspects such as flood control infrastructure development. Inter-agency meetings remain formal and have not yet become collaborative forums for formulating joint policies. Communication and task allocation have occurred, but are limited to the information dissemination stage. Key obstacles to this coordination include budget constraints, a lack of competent personnel, and low public awareness and participation in supporting mitigation programs. The lack of drainage construction in several affected villages also demonstrates weak inter-agency integration in program implementation.*

Keywords: BPBD, Disaster Mitigation, Flood, Government Coordination, PUTR.

Abstrak. Banjir merupakan bencana alam yang masih sering terjadi di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bencana ini menimbulkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Oleh karena itu, masalah banjir sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi yang terlibat langsung dalam upaya mitigasi banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga dalam penanganan banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori koordinasi dari Harold Koontz yang menekankan pada empat unsur penting: perencanaan kerja, pertemuan atau interaksi, komunikasi, dan pembagian tugas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dari kedua instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan secara sinergis. Rencana kerja dari masing-masing instansi belum terintegrasi secara utuh sehingga pelaksanaan program mitigasi banjir berjalan sendiri-sendiri berdasarkan tupoksi masing-masing. BPBD lebih menekankan pada pendekatan mitigasi non-struktural seperti edukasi dan simulasi, sedangkan PUTR berfokus pada aspek teknis seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pertemuan antarinstansi masih bersifat formal dan belum menjadi forum kolaboratif untuk menyusun kebijakan bersama. Komunikasi dan pembagian tugas memang sudah terjadi, tetapi masih sebatas pada tahap penyampaian informasi. Hambatan utama dalam koordinasi ini mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya personel yang kompeten, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program mitigasi. Kurangnya pembangunan drainase di beberapa kelurahan terdampak juga menunjukkan lemahnya integrasi antarinstansi dalam implementasi program.

Kata kunci: Banjir, BPBD, Koordinasi Pemerintah, Mitigasi Bencana, PUTR.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Salah satu bencana yang sering mengancam di sejumlah wilayah adalah banjir. Dihimpun dari data BNPB menunjukkan bahwa 63,7 juta penduduk menempati kawasan rawan terkena bencana banjir. Rawannya kejadian banjir ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari faktor alam maupun non alam yang apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan memunculkan banyak kerugian baik secara individu ataupun sosial (Findayani, 2020). Setiap wilayah memiliki risiko banjir yang signifikan, sama halnya pada Provinsi Kepulauan Riau, secara keseluruhan luas potensi bahaya banjir di provinsi ini masuk pada kategori kelas tinggi.

Tabel 1. Potensi Bahaya Banjir di Kepulauan Riau 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Bahaya				
			Luas(Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Bintan	58.555	29.848	18.074	106.477	Tinggi
2.	Karimun	42.620	20.900	7.928	71.448	Tinggi
3.	Anambas	4.249	3.653	3.178	11.080	Tinggi
4.	Lingga	86.897	45.738	27.841	160.476	Tinggi
5.	Natuna	82.326	38.094	14.284	134.704	Tinggi
6.	Batam	42.958	21.996	13.182	78.136	Tinggi
7.	Tanjungpinang	6.244	3.041	1.819	11.104	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	323.849	163.270	86.306	573.425	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kepulauan Riau 2020-2024

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) 2020–2024, luas total potensi banjir di Kepulauan Riau mencapai 573.425 hektare dengan Kabupaten Lingga tercatat sebagai wilayah dengan potensi bahaya banjir tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Lingga menghadapi kerentanan yang kompleks, mulai dari banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem hingga abrasi, yang sebagian besar disebabkan oleh topografi wilayah dan minimnya sistem infrastruktur penanganan bencana. Di antara seluruh kecamatan yang terdampak, Kecamatan Singkep menjadi fokus utama karena selain merupakan pusat perekonomian daerah, wilayah ini juga memiliki area berisiko tinggi yang ditandai dengan warna merah dalam peta indeks risiko bencana banjir. Lokasi-lokasi seperti kawasan pasar, jalan utama, dan pemukiman menjadi langganan banjir setiap tahun.

Banjir di Singkep disebabkan oleh berbagai faktor. Selain curah hujan tinggi, terdapat pula kondisi geografis wilayah yang berupa cekungan bekas galian tambang timah, aliran sungai atau kolong yang dangkal dan sempit, serta sistem drainase yang buruk. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan turut memperburuk kondisi ini. Berdasarkan

data yang dihimpun, dalam rentang waktu 2021–2024, jumlah titik banjir meningkat dari 5 titik menjadi 11 titik pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 9 titik pada 2024. Selain itu, ratusan kepala keluarga (KK) terdampak setiap tahunnya dengan luas dan genangan air mencapai 70 cm. Fakta ini menandakan bahwa permasalahan banjir masih berulang dan belum tertangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah (Adi, 2024).

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat atas perlindungan dari ancaman bencana. Dalam struktur kelembagaan, BPBD dibentuk sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah yang bekerja sama dengan instansi lain guna memastikan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien (Trisatio, 2022). Di Kabupaten Lingga, BPBD bertindak sebagai *leading sector* kebencanaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, BPBD memiliki tanggung jawab sejak sebelum bencana, saat bencana, hingga pasca bencana, termasuk di Kecamatan Singkep.

Namun demikian, hingga saat ini fokus pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih lebih dominan pada fase tanggap darurat. Fase prabencana seperti mitigasi, peringatan dini, dan edukasi masyarakat masih belum optimal. Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Lingga tahun 2023, pencapaian kinerja mitigasi baru berada pada angka 66,71 persen. Padahal upaya mitigasi bencana sangat penting untuk menurunkan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan kesiapan masyarakat di wilayah rentan (Zulaeha et al., 2022). Sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020–2024, program mitigasi seharusnya menjadi prioritas yang dilaksanakan secara preventif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung efektivitas mitigasi bencana, diperlukan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan mitigasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antarlembaga, salah satunya antara BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kedua instansi ini memiliki keterkaitan langsung, terutama dalam mitigasi fisik seperti pembangunan infrastruktur drainase dan pengelolaan tata ruang wilayah rawan banjir. Peran BPBD lebih banyak pada aspek koordinasi, sosialisasi masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan, sedangkan Dinas PUTR bertugas secara teknis dalam membangun dan memelihara sistem drainase serta pengendalian banjir (Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2022). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa program mitigasi banjir di Kecamatan Singkep masih terkesan berjalan sendiri-sendiri atau belum teralokasi dengan baik dalam pelaksanaannya sedangkan tujuan dari mitigasi dan penanggulangan bencana belum

tercapai secara optimal. Pembagian tugas dan komunikasi yang jelas seharusnya bisa dijalankan secara maksimal oleh masing-masing instansi ini agar dapat menyelaraskan berbagai kegiatan mitigasi dan meminimalkan dampak dari bencana banjir dengan begitu dapat dilihat penyebab masalah koordinasi serta dapat memahami konsep koordinasi yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena masih terbatasnya kajian yang membahas secara mendalam aspek koordinasi pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana banjir, khususnya di Kabupaten Lingga. Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan menggali secara sistematis proses koordinasi, hambatan, dan sinergi antara BPBD dan Dinas PUTR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, serta melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses koordinasi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Dann Sugandha (Muzdalifah et al., 2023), koordinasi merupakan penyatuan gerak dari berbagai unit yang memiliki fungsi berbeda agar tetap mengarah pada sasaran yang sama. Koordinasi menjadi salah satu fungsi penting dalam manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menyatukan tindakan antar unit atau instansi agar kegiatan yang dijalankan dapat selaras, efisien, dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dilakukan tidak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal dan diagonal sebagaimana dijelaskan oleh Handyaningrat (Sentika, 2020), untuk menyatukan pelaksanaan tugas antar instansi baik yang setara maupun berbeda struktur hierarki. Teori koordinasi dari Harold Koontz (Herman, 2013) memperjelas bahwa koordinasi yang efektif harus di dukung oleh empat unsur utama, yaitu: rencana kerja, pertemuan, komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas.

Penanggulangan bencana, khususnya banjir, merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), terutama pada aspek mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik seperti infrastruktur pengendalian banjir (mitigasi struktural), maupun melalui pendekatan non-struktural seperti

sosialisasi dan penataan ruang (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2). Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara BPBD dan Dinas PUTR menjadi penting untuk mengefektifkan kegiatan penanggulangan banjir secara teknis dan terencana.

Beberapa penelitian terdahulu turut memberikan dasar dan pembanding bagi penelitian ini. Misalnya, penelitian Gultom (2023) menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Serang masih belum efektif karena adanya hambatan internal dan eksternal. Penelitian lain oleh Wahyudi, Muradi, dan Yuningsih (2024) menekankan bahwa koordinasi dalam penanggulangan banjir di Kota Cimahi masih menitikberatkan pada satu OPD saja, tanpa sinergi lintas instansi. Sementara itu, penelitian oleh Sumiati dan Arifin (2024) menemukan bahwa kurangnya proses pertemuan antara BPBD dan dinas Sosial di Kota Cimahi menjadi faktor utama kurang optimalnya koordinasi. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus instansi, yakni mengkaji koordinasi antara BPBD dan Dinas PUTR di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga dengan menggunakan indikator dari Harold Koontz. Dengan merujuk pada teori-teori tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah kajian terkait efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mitigasi bencana banjir. Fokusnya adalah bagaimana BPBD dan Dinas PUTR berkoordinasi melalui perencanaan kerja, komunikasi, pertemuan, dan pembagian tugas dalam menghadapi bencana banjir di wilayah yang rawan seperti Kecamatan Singkep.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh koordinasi pemerintah dalam upaya mitigasi banjir di Singkep terutama antara BPBD dengan Dinas PUTR. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan mitigasi, seperti pihak pelaksana dan sekretariat BPBD Lingga, pengelola bidang SDA dan sub bagian perencanaan dan evaluasi Dinas PUTR Lingga, pihak kelurahan serta tokoh dan masyarakat terdampak. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi pemerintahan dalam upaya mitigasi bencana banjir menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan bencana. Pemerintah memiliki peran sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab utama. Berdasarkan hasil pengamatan

peneliti di lapangan, dalam pelaksanaannya koordinasi antar lembaga pemerintahan terutama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lingga menjadi aspek krusial sebab BPBD berperan sebagai *leading sector* kebencanaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2011. Dalam konteks ini, BPBD Lingga sebagai lembaga yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator dituntut mampu melibatkan instansi lain yang dianggap perlu pada tahap prabencana mitigasi bencana banjir terutama dengan Dinas PUTR Lingga mengingat bahwa dalam struktur organisasi Dinas PUTR terdapat bidang sumber daya air yang turut aktif dalam menjalankan program-program mitigasi pengendalian banjir secara fisik.

Koordinasi antara BPBD dan Dinas PUTR Kabupaten Lingga termasuk dalam koordinasi horizontal. Keduanya berada di tingkat yang sama dalam struktur pemerintahan daerah, yaitu sebagai organisasi perangkat daerah di bawah pemerintah kabupaten. Dalam masa prabencana, BPBD dan PUTR Lingga menjalankan berbagai kegiatan mitigasi yang mencakup sektor fisik maupun nonfisik, seperti sosialisasi dan perbaikan infrastruktur. Namun demikian, koordinasi antara BPBD dan Dinas PUTR dalam upaya mitigasi banjir di Kecamatan Singkep masih menghadapi kendala dan belum terorganisasi dengan baik. Berdasarkan teori koordinasi dari Harold Koontz (Herman, 2013) memperjelas bahwa koordinasi yang efektif harus di dukung oleh empat unsur utama, yaitu: rencana kerja, pertemuan, komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas. Hasil pengkajian lebih jelas keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja

Rencana kerja antara BPBD dan Dinas PUTR menjelaskan maksud dan tujuan dari koordinasi yang dilakukan, serta siapa saja yang menjadi sasaran dalam mitigasi tersebut. Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan agar pelaksanaan koordinasi bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis tujuan dari adanya koordinasi ini adalah untuk memastikan setiap instansi menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi pokok masing-masing, karena keduanya sama-sama memiliki tugas dan fungsi dalam upaya mitigasi bencana banjir, guna mencegah terjadinya banjir serta meminimalkan dampak dan risiko bencana di masa mendatang, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Lingga Nomor 9 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi keduanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kecamatan Singkep, BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk hal-hal yang bersifat teknis dan fisik, seperti pengerukan saluran drainase atau normalisasi sungai yang menjadi bagian dari program Dinas PUTR melalui

bidang sumber daya air. Sementara itu, BPBD lebih fokus pada program mitigasi non-teknis, BPBD berperan dalam mengoordinasikan keterlibatan masyarakat dan instansi lain dalam kegiatan prabencana untuk menekan kemungkinan terjadinya bencana serta dampaknya seperti sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan kepada masyarakat. Berikut perbandingan program kerja mitigasi banjir oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya.

Tabel 2. Perbandingan Rencana Mitigasi Banjir oleh BPBD dan PUTR Lingga

No	BPBD Kabupaten Lingga	Dinas PUTR Kabupaten Lingga
1.	Menyusun peta rawan banjir berdasarkan laporan masyarakat serta data historis banjir.	Mendukung perencanaan teknis pembangunan drainase dan sistem pengendali banjir.
2.	Melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai potensi banjir.	Menghimbau agar masyarakat selalu membersihkan saluran yang telah dibangun.
3.	Melaksanakan program pelatihan kesiapsiagaan masyarakat melalui desa tangguh bencana dan relawan bencana.	Melakukan pengawasan terhadap tata ruang dan penertiban pembangunan di daerah rawan banjir.
4.	Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.	Merancang dan membangun sistem drainase, serta melakukan pengerukan kolong/sungai dangkal di titik banjir.

Sumber: Dokumen LKJIP BPBD dan PUTR Kabupaten Lingga, 2023 (diolah)

Dari wawancara juga diketahui bahwa meskipun belum ada strategi kolaboratif yang disusun secara bersama antara BPBD dan Dinas PUPR, kedua instansi telah memiliki program kerja yang berjalan sesuai dengan kewenangan serta tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Keduanya berkoordinasi dengan saling mengingatkan dan menginformasikan upaya mitigasi yang akan dilakukan tanpa adanya dokumen atau perencanaan yang dirancang dan disepakati bersama, hanya didasarkan pada kesepahaman dan komunikasi secara lisan. Dengan itu dalam aspek rencana kerja, koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dapat dikatakan belum sepenuhnya sejalan dengan teori pelaksanaan koordinasi menurut Harold Koontz (Herman, 2013). Pada pelaksanaannya masih belum maksimal, seharusnya ada perencanaan yang terintegrasi dan kesepakatan yang jelas agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sinergis.

Pertemuan

Pertemuan adalah proses yang bertujuan untuk melakukan keselarasan pada pelaksanaan mitigasi bencana banjir sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan program. Indikator pertemuan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan koordinasi di lapangan. Meskipun belum adanya penyusunan rencana kerja bersama, pertemuan antara BPBD dan Dinas PUTR Kabupaten Lingga telah dilaksanakan secara situasional untuk menyelaraskan kegiatan mitigasi banjir. Pertemuan ini umumnya diprakarsai oleh BPBD, ketika BPBD

mendapatkan informasi data kondisi cuaca terbaru dari BMKG maka BPBD segera melakukan pertemuan dengan Dinas PUTR untuk mengingatkan Dinas PUTR agar upaya mitigasi bencana banjir seperti normalisasi saluran drainase dilaksanakan dengan baik. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan dan kepala bidang Sumber Daya Air. Masing-masing pihak saling mengingatkan dan menyampaikan rencana kesiapsiagaan menghadapi banjir dan sudah memiliki program kerja dan anggaran tersendiri, koordinasi lebih difokuskan pada penyampaian progres dan keselarasan langkah di lapangan terutama antara BPBD dan Dinas PUTR, bukan pada penyusunan program baru.

Jika dikaitkan dengan teori pelaksanaan koordinasi menurut Harold Koontz (Herman, 2013), indikator pertemuan telah dijalankan meskipun belum maksimal. Dalam teori tersebut, pertemuan merupakan bagian penting dalam koordinasi karena menjadi media penyampaian informasi, penyatuan langkah, serta sarana tindak lanjut atas program yang telah dan akan dijalankan. Namun pada praktiknya, pertemuan antara BPBD dan Dinas PUTR dalam upaya mitigasi banjir di Kecamatan Singkep belum dilakukan secara rutin dan sistematis, melainkan tergantung situasi di lapangan. Masing-masing sudah memiliki program kerja dan anggaran tersendiri, koordinasi lebih difokuskan pada penyampaian progres dan keselarasan langkah di lapangan. Artinya, pelaksanaan indikator pertemuan sudah sesuai secara prinsip, namun pertemuan belum mampu menjadi forum pengambilan keputusan strategis atau penyesuaian program secara menyeluruh dan masih perlu ditingkatkan agar koordinasi yang terjalin bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah. Melalui komunikasi, seorang koordinator bisa mengetahui berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan upaya mitigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan di lapangan, bahwa komunikasi pada pelaksanaan koordinasi antara BPBD dan dinas PUTR dalam upaya mitigasi banjir di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga masih belum berjalan secara optimal. Meskipun komunikasi antar keduanya telah dilakukan, seperti respons cepat saat sebelum dan setelah terjadi banjir dimana kedua pihak saling berkoordinasi baik melalui pertemuan langsung maupun telepon, namun intensitas pertemuan masih rendah dan belum terjadwal secara tetap. Selain itu, belum adanya pihak yang secara resmi ditunjuk sebagai koordinator, disini BPBD memang menjalankan perannya sebagai fungsi koordinasi dan mengingatkan Dinas PUTR agar segera menangani titik-titik rawan banjir tapi pelaksanaan kegiatan di lapangannya tetap dipimpin oleh kepala instansi mereka sendiri sesuai dengan tupoksi.

keduanya sebatas saling menginformasikan perkembangan kegiatan masing-masing pada saat pemberian instruksi atau pemantauan terhadap kegiatan mitigasi banjir.

Di sisi lain, komunikasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi, himbauan dan kerja bakti yang disampaikan melalui kelurahan hingga tingkat RT/RW. Namun, masih ditemukan kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan pemerintah, seperti yang dirasakan warga pada beberapa kelurahan terutama kelurahan Sungai Lumpur yang mengeluhkan kurangnya bantuan alat dan tindak lanjut dari Dinas PUTR. Peran dalam menangani masalah banjir secara menyeluruh juga dinilai masih kurang dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas PUTR. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi masih cenderung satu arah dan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika merujuk pada teori pelaksanaan koordinasi menurut Harold Koontz (Herman, 2013), kondisi ini belum memenuhi prinsip komunikasi yang efektif dan menyeluruh, karena meskipun ada interaksi antarpihak, penyampaian informasi belum merata, tindak lanjut belum maksimal, serta belum ada sistem komunikasi yang mampu menjembatani dengan baik antara struktur formal pemerintahan dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas antara BPBD dan Dinas PUTR dalam upaya mitigasi banjir penting dilihat agar gambaran koordinasi yang terjalin dapat terlihat lebih jelas serta bisa menjadi dasar untuk perbaikan koordinasi ke depannya, dengan memahami secara rinci siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek kegiatan mitigasi bencana banjir oleh masing-masing instansi. Berdasarkan wawancara tidak terdapat pembagian tugas antara BPBD dan Dinas PUTR dalam upaya mitigasi banjir di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, karena masing-masing instansi telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yaitu BPBD dalam mitigasi hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, informasi kebencanaan kepada masyarakat maupun dinas terkait sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Kegiatan BPBD Lingga dalam Mitigasi di Singkep

No	Nama kegiatan	Sub kegiatan
1.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana melalui media social Sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal pada beberapa kelurahan secara langsung Membuat SOP bencana banjir di lingkup RT/RW pada beberapa kelurahan. Membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got/sungai kecil pada beberapa kelurahan. Menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir

	Pengembangan kapasitas tim TRC di Kecamatan
--	---

Sumber: LKJIP BPBD Lingga, 2023

Sedangkan tugas Dinas PUTR dalam penanganan banjir lebih difokuskan pada aspek teknis, terutama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur terkena dampak bencana seperti drainase dengan beberapa kegiatan penanganan banjir sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Paket Pekerjaan Penanganan Banjir oleh PUTR di Singkep

No	Nama Pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Persiapan Kebun Nyiur	Desa Batu Bedaun	2022
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Karang Tengah RW.04 Sekop Laut Kel. Dabo	Kel. Dabo	
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Perbatasan RW.01 dan RW.10 Pasir Putih	Kel. Dabo	
4	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 01 / RW. 06 Dusun 3 Kebun Nyiur Desan Batu Bedaun	Desa Batu Bedaun	
5	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 02 / RW. 09 Kel. Dabo	Kel. Dabo	
6	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 02 Kel. Dabo Lama	Kel. Dabo Lama	
7	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 05 Kel. Dabo Lama	Kel. Dabo Lama	
8	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 07 Sekop Darat Kel. Dabo	Kel. Dabo	
9	Pembangunan Drainase Lingkungan Sergang Laut Desa Tanjung Harapan	Kec. Singkep	
10	Pembangunan Drainase Lingkungan SMA 1 Singkep	Kel. Dabo	
11	Revitalisasi Drainase Kota Dabo Kec. Singkep	Kec. Singkep	
12	Pembangunan Drainase Mayor RT. 05 RW. 04 Sekop Laut Kel. Dabo	Kel. Dabo	
13	Pembangunan Drainase Mayor Simpang Patung Dabo Singkep (Lanjutan)	Kel. Dabo	
1	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 05 Kelurahan Sungai Lumpur	Kel. Sungai Lumpur	2023
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Bukit Abun RW.05 Kel.Dabo Lama	Kel.Dabo Lama	
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan	
4	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 012 Kel. Dabo	Kel. Dabo	
5	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 01 Desa Batu Kacang	Desa Batu Kacang	
6	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 10 Kel. Dabo	Kel. Dabo	
7	Pembangunan Drainase Mayor Bukit Abun	Kel.Dabo Lama	

8	Pembangunan Saluran Utama Pembuangan Akhir Sekop Laut	Kel. Dabo	2024
9	Revitalisasi Drainase Mayor Belakang SMA 2 Singkep	Kel. Sungai Lumpur	
1	Pembangunan Drainase Lingkungan RW. 08 Kelurahan Dabo	Kel. Dabo	
2	Pembangunan Drainase Mayor Lanjutan Simpang Patung	Kel. Dabo	

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Lingga, 2025

Terlihat bahwa pertahun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPBD maupun PUTR dalam mitigasi atau penanganan banjir. Namun, dari penjabaran di lapangan, terutama berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa sosialisasi dan pembangunan dari BPBD maupun PUTR belum merata. Ada wilayah yang sudah merasakan manfaat dari kegiatan, tetapi ada juga yang mengaku belum pernah menerima himbauan atau pembangunan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pembagian tugas sudah jelas, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan, khususnya pada upaya penyebaran informasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian jika merujuk pada teori pelaksanaan koordinasi menurut Harold Koontz (Herman, 2013), yang menekankan pentingnya kejelasan siapa melakukan apa agar tidak terjadi duplikasi atau kekosongan tugas, maka pembagian tugas antara BPBD dan Dinas PUTR sudah tergolong sesuai. Masing-masing instansi memiliki ruang kerja yang berbeda namun saling melengkapi. Akan tetapi, efektivitas dari pembagian tugas ini belum sepenuhnya optimal karena belum semua hasil dari pembagian tersebut terimplementasi dengan merata dan maksimal di lapangan, terutama dalam aspek penyampaian informasi ke masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan pembagian tugas ini turut dipengaruhi juga oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing instansi. Baik dari jumlah personel maupun pengalaman kerja, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Salah satu contohnya adalah lamanya proses pengerjaan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur banjir. Permasalahan kadang juga berasal dari keterlambatan pencairan anggaran yang diterima Dinas PUTR dari APBD Kabupaten Lingga, yang mengakibatkan proses pembangunan menjadi terhambat. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan peninjauan lokasi serta penyampaian informasi dari BPBD ke Dinas PUPR tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berdampak langsung terhadap capaian indikator koordinasi ideal dalam upaya mitigasi bencana banjir secara keseluruhan di Singkep.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi pemerintah antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kecamatan Singkep belum terlaksana secara optimal. Meskipun terdapat kesadaran dan upaya untuk saling melengkapi peran antar instansi, namun rencana kerja yang dijalankan belum sepenuhnya disusun secara terpadu, sehingga program mitigasi masih dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Pertemuan yang dilakukan lebih bersifat menyampaikan informasi, bukan merumuskan strategi bersama secara menyeluruh. Komunikasi antara BPBD dan Dinas PUTR memang sudah ada, tetapi masih bersifat sementara dan belum teratur, sehingga informasi kadang tidak tersampaikan dengan baik. Begitu juga dengan komunikasi ke masyarakat yang belum menjangkau semua wilayah terdampak. Sementara itu, pembagian tugas sudah cukup jelas, BPBD menangani sosialisasi, sedangkan Dinas PUTR bertanggung jawab pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah yang belum mendapat perhatian karena terbatasnya jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia. Secara keseluruhan, koordinasi yang seharusnya bisa menyatukan semua upaya ini masih lemah dan perlu diperbaiki agar upaya mengurangi dampak banjir bisa lebih efektif dan merata.

Sebagai tindak lanjut, penulis menyarankan agar pemerintah Lingga memperkuat sinergi dan integrasi antara BPBD dan Dinas PUTR melalui penyusunan rencana kerja bersama yang berbasis data kawasan rawan banjir dan respons masyarakat. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dengan jadwal pertemuan rutin dan evaluasi bersama untuk mengantisipasi tumpang tindih kegiatan. Penulis juga menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup dua instansi dan fokus wilayah Kecamatan Singkep saja. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar melibatkan lebih banyak aktor dan memperluas cakupan wilayah guna memperoleh gambaran koordinasi yang lebih komprehensif dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lingga.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I. (2024, [bulan tidak diketahui]). Banjir di Dabo Singkep jadi langganan warga tanpa solusi pemerintah. RRI.co.id. <https://www.rri.co.id/daerah/701824/banjir-di-dabo-singkep-jadi-langganan-warga-tanpa-solusi-pemerintah>
- Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.
- Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023.

- Findayani, A. (2020). Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, 12(3), 102-114.
- Gultom, M. W. P. (2023). Koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Skripsi). Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Herman, S., & Suryadi, H. (2013). Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Pekanbaru (laporan penelitian). Kecamatan Singkep dalam Angka 2024.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Lingga 2023.
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompia, A. T., & Attajani, M. K. (2023). Model koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (hal. 1-7).
- Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
- Ramli, S. (2010). *Pedoman praktis manajemen bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sumiati, I., & Arifin, R. K. (2024). Koordinasi penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 132-140. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i2.1208>
- Trisatio, C. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (laporan).
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahyudi, B., Muradi, M., & Yuningsih, N. Y. (2024). Koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 845-858. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.886>
- Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi bencana: Perspektif kebijakan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3).